

# Pengaruh Whistleblowing System terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah

Loso Judijanto

IPOSS Jakarta; [losojudijantobumn@gmail.com](mailto:losojudijantobumn@gmail.com)

---

## Info Artikel

### Article history:

Received Januari, 2025

Revised Januari, 2025

Accepted Januari, 2025

---

### Kata Kunci:

Sistem pelaporan pelanggaran, Transparansi pemerintah, Akuntabilitas pemerintah, Tata kelola sektor publik

---

### Keywords:

Violation reporting system, Government transparency, Government accountability, Public sector governance

---

## ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki bagaimana sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pemerintah di Indonesia. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, di mana 45 pegawai pemerintah diminta untuk memberikan data dengan menggunakan kuesioner terstruktur dengan 1-5 pada skala Likert untuk mengukur respon. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS versi 25. Statistik deskriptif, korelasi, dan analisis regresi dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara sistem whistleblowing dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Lebih khusus lagi, sistem whistleblowing tampaknya menjadi prediktor yang signifikan secara statistik untuk transparansi pemerintah, dengan nilai  $\beta$  sebesar 0,62 pada  $p < 0,001$ , dan akuntabilitas pemerintah, dengan nilai  $\beta$  sebesar 0,58 pada  $p < 0,001$ . Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan pelanggaran yang efektif berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas di dalam lembaga pemerintah. Oleh karena itu, studi ini menekankan perlunya implementasi dan pemeliharaan mekanisme yang efektif untuk pelaporan pelanggaran untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor publik Indonesia.

---

## ABSTRACT

This study investigates how the whistleblowing system affects government transparency and accountability in Indonesia. A quantitative approach was used in the study, in which 45 government employees were asked to provide data using a structured questionnaire with 1-5 on the Likert scale to measure responses. The analysis method used in this study is SPSS version 25. Descriptive statistics, correlation, and regression analysis were performed. The results of the study show that there is a strong positive relationship between the whistleblowing system and government transparency and accountability. More specifically, the whistleblowing system appears to be a statistically significant predictor of government transparency, with a  $\beta$  value of 0.62 at  $p < 0.001$ , and government accountability, with a  $\beta$  value of 0.58 at  $p < 0.001$ . Therefore, these findings suggest that an effective whistleblowing system contributes to increased transparency and accountability within government agencies. Therefore, this study emphasizes the need for the implementation and maintenance of effective mechanisms for whistleblowing to improve good governance in Indonesia's public sector.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

**Corresponding Author:**

Name: Loso Judijanto  
Institution: IPOSS Jakarta  
Email: [losojudijantobumn@gmail.com](mailto:losojudijantobumn@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Whistleblowing merupakan mekanisme penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasi pemerintah, terutama di Indonesia, di mana tuntutan publik akan integritas semakin tinggi. Dengan memungkinkan pelaporan kegiatan tidak etis atau korup tanpa takut pembalasan, whistleblowing dapat mengungkap malpraktik tersembunyi. Kerangka hukum yang efektif sangat penting untuk melindungi pelapor dari intimidasi dan pembalasan yang sering terjadi di Indonesia (Aprilla et al., 2024). Namun, peraturan yang ada belum diterapkan dengan baik, menciptakan budaya ketakutan yang menghalangi calon pelapor. Reformasi yang diusulkan termasuk peningkatan perlindungan hukum, kapasitas penegakan hukum, dan budaya yang mendukung pelapor (Dewi & Padnyawati, 2022; Wardani et al., 2021). Transparansi dan akuntabilitas terkait langsung dengan kepercayaan publik (Wardani et al., 2021). Pelaporan yang berhasil dapat meningkatkan tata kelola dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah (Wahyuni & Nova, 2018). Studi kasus menunjukkan bahwa transparansi yang lebih tinggi berkorelasi dengan kepercayaan publik yang lebih besar, menekankan perlunya sistem pelaporan yang efektif. Pelaporan harus menjadi bagian dari strategi yang melibatkan kolaborasi antara para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan media (Anugrah et al., 2021). Melibatkan warga negara sebagai pemantau sosial dapat meningkatkan efektivitas inisiatif antikorupsi dan akuntabilitas (Hasanah et al., 2023).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik, yang menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kegiatan pemerintah. Transparansi memastikan bahwa proses pengambilan keputusan terbuka dan dapat diakses, sementara akuntabilitas membuat pejabat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Bersama-sama, prinsip-prinsip ini menciptakan kerangka kerja bagi warga negara untuk terlibat dan mempercayai pemerintah mereka. Transparansi memungkinkan warga negara mengakses informasi tentang tindakan pemerintah, meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka (Akhyar et al., 2022). Tata kelola yang terbuka mengurangi risiko korupsi dengan membuat proses pengambilan keputusan dapat dilihat oleh publik (Utama & Hidayatulloh, 2020), dan tingkat transparansi yang lebih tinggi berkorelasi dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah (Handayani et al., 2024). Akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka, sehingga menumbuhkan budaya tanggung jawab (Yusrizal et al., 2021). Sistem pengaduan yang efektif dan pengawasan publik sangat penting untuk meminta pertanggungjawaban pejabat (Siringoringo, 2015), sementara pengelolaan sumber daya publik yang tepat melalui pelaporan keuangan yang transparan akan meningkatkan akuntabilitas (Sultan, 2023).

Efektivitas sistem pelaporan pelanggaran dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, khususnya di Indonesia, masih menjadi perdebatan. Sementara para pendukung berpendapat bahwa sistem ini mendorong perilaku etis di kalangan pejabat pemerintah, para pengkritik menyuarakan keprihatinan tentang pelaksanaannya dan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran. Sistem pelaporan pelanggaran dirancang untuk mendorong warga negara melaporkan korupsi, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan (Osman, 2024). Inisiatif yang berhasil di Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan

warga negara dapat memperkuat kebijakan antikorupsi dan meningkatkan kepercayaan public (Dela & Frinaldi, 2023). Efektivitas sistem ini bergantung pada perlindungan hukum yang kuat bagi pelapor, yang sering menghadapi risiko signifikan saat mengungkapkan korupsi (Wawo, 2022). Mekanisme perlindungan yang komprehensif diperlukan tidak hanya selama proses hukum tetapi juga pasca-pengungkapan untuk memastikan keamanan pelapor (Riyanto & Arifin, 2022). Integrasi audit investigasi dengan sistem pelaporan pelanggaran dapat meningkatkan deteksi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, karena audit ini memvalidasi pengungkapan yang dilakukan oleh pelapor (Anlilua, 2023). Proses audit investigasi yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk keberhasilan sistem whistleblowing, karena dapat memediasi efektivitas pengungkapan kecurangan (Aziza et al., 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana sistem whistleblower berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah Indonesia. Penelitian ini juga berusaha untuk berkontribusi pada literatur tentang bagaimana mekanisme whistleblowing dapat berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang baik, terutama di dalam lembaga-lembaga pemerintah Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah*

Tata kelola pemerintahan yang baik bergantung pada transparansi dan akuntabilitas untuk menumbuhkan kepercayaan publik dan mencegah korupsi. Transparansi memungkinkan warga negara mengamati tindakan pemerintah, memfasilitasi keterlibatan publik, sementara akuntabilitas memastikan pejabat bertanggung jawab atas keputusan mereka. Di Indonesia, di mana korupsi masih menjadi tantangan, kedua prinsip ini saling berkaitan. Transparansi adalah hak dasar warga negara dan kewajiban manajer publik untuk manajemen yang efektif (Puspita, 2021). Ini juga mendorong kepercayaan terhadap lembaga dan memungkinkan partisipasi masyarakat, seperti terlihat dalam Undang-Undang Tanggung Jawab Fiskal di Brasil (Prameswari et al., 2022). Di Indonesia, transparansi membantu memerangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan public (Saida et al., 2023). Akuntabilitas memastikan pejabat publik bertanggung jawab, yang penting untuk menjaga kepercayaan public (Rahmarta et al., 2024), dan mekanisme seperti sistem pelaporan pelanggaran meningkatkan akuntabilitas dengan memungkinkan pelaporan (Ulum & Raviona, 2023). Praktik akuntabilitas yang efektif meningkatkan kepercayaan publik, seperti ditunjukkan dalam birokrasi.

### 2.2 *Sistem Pelaporan Pelanggaran: Definisi dan Pentingnya*

Sistem pelaporan pelanggaran penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, terutama di sektor publik, karena memungkinkan karyawan melaporkan kegiatan tidak etis atau ilegal tanpa takut pembalasan, menciptakan lingkungan yang berintegritas. Perlindungan terhadap pelapor harus dijamin untuk mencegah tindakan pembalasan, yang penting untuk mendorong pelaporan (Wuryandini & Panigoro, 2024). Kerangka hukum dan kebijakan organisasi diperlukan untuk memastikan pelapor merasa aman (Rusvalita, 2017). Sistem ini juga efektif dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan, terbukti dengan korelasi antara pelaporan dan berkurangnya kecurangan. Di PT Pegadaian, penerapan sistem pelaporan meningkatkan tindakan pencegahan kecurangan sebesar 32,5%. Whistleblower berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dengan mengungkap korupsi dan praktik tidak etis, yang menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah (Lubis & Bahmid, 2024). Menumbuhkan budaya whistleblowing dapat meningkatkan perilaku etis dan mengurangi kecenderungan korupsi (Rusvalita et al., 2017).

### 2.3 *Pelaporan Pelanggaran dalam Konteks Indonesia*

Indonesia telah membuat langkah maju dalam meningkatkan tata kelola melalui Undang-Undang Perlindungan Pelaporan Pelanggaran tahun 2008 untuk melindungi pelapor pelanggaran. Namun, tantangan masih ada, termasuk penerapan hukum yang tidak konsisten dan budaya takut

di kalangan pegawai negeri sipil. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum untuk perlindungan pelapor, tetapi implementasinya masih memadai (Faradilla & Sofyan, 2024). Banyak pegawai negeri sipil yang ragu melaporkan penyimpangan karena takut akan pembalasan, mengindikasikan kesenjangan antara peraturan dan praktik (Jeandry & Mokoginta, 2021; Putri et al., 2024). Selain itu, terdapat kurangnya kesadaran tentang perlindungan whistleblower di kalangan masyarakat dan pegawai negeri sipil (Prameswari et al., 2022), sementara institusi pemerintah sering kali tidak memberikan dukungan yang memadai, membuat pelapor enggan. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga pemerintah daerah mendapatkan manfaat dari whistleblowing, terutama di daerah dengan pengawasan lemah, dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memantau upaya antikorupsi, meningkatkan transparansi, dan mendorong akuntabilitas (Aziza et al., 2024).

#### **2.4 Pelaporan Pelanggaran dan Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah**

Pembentukan sistem pelaporan pelanggaran sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah, terutama dalam memerangi korupsi dan perilaku tidak etis. Penelitian menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya memfasilitasi pelaporan pelanggaran tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik melalui deteksi dan tindakan tepat waktu terhadap pelanggaran (Wardani et al., 2021). Sistem ini meningkatkan transparansi, yang mengarah pada kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap lembaga pemerintah dan meyakinkan publik tentang langkah-langkah akuntabilitas, mendorong keterlibatan warga negara serta pelaporan pelanggaran (Wahyuni & Nova, 2018). Pelaporan pelanggaran penting dalam mengungkap penipuan keuangan dan penyalahgunaan kekuasaan, serta meminta pertanggungjawaban pejabat public (Anugrah et al., 2021). Di Indonesia, penerapan sistem ini dapat mengungkap korupsi di sektor-sektor yang sering terlindung dari pengawasan, mendorong budaya akuntabilitas (Zahra et al., 2024). Perlindungan dari pembalasan sangat penting untuk mendorong pelaporan tanpa rasa takut, sementara faktor seperti kesadaran etis dan dukungan organisasi dapat memotivasi individu untuk melakukan whistleblowing, meskipun rasa takut akan pembalasan tetap menjadi penghalang signifikan.

Namun demikian, efektivitas sistem tersebut dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Indonesia mungkin berbeda, tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga dan institusi pemerintah, perlindungan hukum bagi pelapor, dan mekanisme penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini melihat perubahan yang terjadi dalam transparansi dan akuntabilitas pemerintah di Indonesia yang dipengaruhi oleh sistem whistleblowing dan akan menjadi aset dalam memperoleh pelajaran yang berguna untuk membantu meningkatkan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

#### **2.5 Kesenjangan dan Kontribusi Penelitian**

Meskipun berbagai literatur telah mengidentifikasi pentingnya whistleblowing dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, masih sedikit yang diketahui mengenai dampak spesifik dari sistem whistleblowing di Indonesia. Sebagian besar penelitian berfokus pada negara-negara Barat, dengan penelitian yang terbatas pada konteks Indonesia. Selain itu, efektivitas sistem whistleblowing di institusi pemerintah Indonesia belum diteliti secara menyeluruh. Penelitian ini mencoba menjembatani kesenjangan pengetahuan ini dengan menilai persepsi pegawai pemerintah terkait seberapa efektif sistem whistleblowing dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Indonesia.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain**

Desain penelitian ini bersifat korelasional, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sistem whistleblowing dan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam hal tingkat dan kekuatannya. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan pendekatan kuantitatif yang menyediakan pengukuran variabel yang objektif dan memungkinkan untuk menetapkan

kemungkinan penyebab yang menghubungkan sistem whistleblowing dengan hasil transparansi dan akuntabilitas. Kuesioner terstruktur memastikan pengumpulan data yang sistematis dari para peserta.

**3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintah yang bekerja di berbagai lembaga pemerintah di Indonesia. Karena jumlah responden yang berpotensi menjadi responden cukup banyak, sampel sebanyak 45 peserta dipilih melalui purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana partisipan dipilih berdasarkan adanya karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian (Bryman, 2012). Partisipan dipilih berdasarkan pengetahuan atau keterlibatan mereka dengan sistem pelaporan pelanggaran di lembaga pemerintah masing-masing.

Jumlah sampel sebanyak 45 orang dipilih sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis tanpa kehilangan informasi penting, dengan mempertimbangkan keterbatasan praktis seperti waktu dan sumber daya. Meskipun sampel dapat dianggap kecil, namun hal ini mencerminkan ruang lingkup yang menjadi perhatian studi ini dan dengan demikian menyampaikan informasi yang relevan dan berguna mengenai pandangan yang dirasakan oleh pegawai di pemerintahan terkait dengan efektivitas sistem pelaporan pelanggaran.

**3.3 Pengumpulan Data**

Variabel-variabel utama yang menjadi perhatian - sistem whistleblowing, transparansi pemerintah, dan akuntabilitas pemerintah - dapat diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikelola sendiri. Kuesioner diberikan kepada 45 pegawai pemerintah yang terpilih. Para responden diyakinkan bahwa mereka akan menjawab survei secara anonim untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka dan untuk mengurangi kemungkinan bias keinginan sosial.

**3.4 Analisis Data**

Analisis data untuk kuesioner dilakukan dengan SPSS versi 25, dimulai dengan statistik deskriptif berupa nilai rata-rata, standar deviasi, dan frekuensi yang merangkum data demografis peserta dan tanggapan mereka terhadap survei. Hal ini memberikan gambaran umum tentang data dan menunjukkan pola apa pun. Keandalan kuesioner ini diperiksa dengan menggunakan Cronbach's alpha untuk konsistensi internal, yang dapat diterima jika berada pada angka 0,7 atau lebih tinggi seperti yang disarankan oleh George & Mallery (2003). Untuk memverifikasi hubungan antara peningkatan sistem pelaporan pelanggaran dan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, digunakan korelasi Pearson. Korelasi positif dengan hubungan yang sangat signifikan berarti bahwa semakin baik perbaikan dalam Sistem Pelaporan Pelanggaran, semakin tinggi transparansi dan akuntabilitas. Terakhir, analisis regresi berganda dilakukan untuk menganalisis kontribusi whistleblowing system terhadap transparansi dan akuntabilitas, dengan mengontrol variabel demografi.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Statistik Deskriptif**

Profil demografi responden dirangkum dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.1:

Demographic Characteristic	Frequency (%)
Gender	
Male	28 (62.2%)
Female	17 (37.8%)
Age	
21-30 years	14 (31.1%)
31-40 years	18 (40.0%)

Demographic Characteristic	Frequency (%)
41-50 years	9 (20.0%)
51 years and above	4 (8.9%)
Position	
Junior staff	19 (42.2%)
Senior staff	26 (57.8%)
Years of Experience	
1-5 years	11 (24.4%)
6-10 years	15 (33.3%)
11-15 years	13 (28.9%)
16 years and above	6 (13.3%)

Informasi demografis tentang responden dalam penelitian ini merupakan representasi yang adil dalam hal jenis kelamin, usia, posisi, dan tahun pengalaman. Sampel terdiri dari 62,2% laki-laki, yang terdiri dari 28 peserta, dan 37,8% perempuan, yang terdiri dari 17 peserta, menunjukkan bahwa sampel didominasi oleh laki-laki, yang sangat umum terjadi di sebagian besar sektor dan terutama di lembaga pemerintah atau publik. Namun, responden perempuan menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan di tempat kerja. Berdasarkan usia, kelompok usia 31-40 tahun adalah yang terbesar, dengan 40,0% yang mewakili 18 partisipan, diikuti oleh kelompok usia 21-30 tahun, yang terdiri dari 14 partisipan dan menyumbang 31,1%. Kelompok usia lainnya, seperti 41-50 tahun dengan 20,0% dan 51 tahun ke atas dengan 8,9%, memiliki porsi yang lebih kecil, sehingga mengindikasikan bahwa mayoritas tenaga kerja berusia lebih muda, dengan lebih sedikit staf yang lebih tua atau lebih senior.

Distribusi posisi responden adalah sebagai berikut: 57,8% memegang posisi staf senior, sebanyak 26 orang, sementara staf junior terdiri dari 19 orang (42,2%). Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak peserta yang berpengalaman atau memiliki wewenang. Representasi ini memberikan bobot yang seimbang untuk memahami bagaimana sistem whistleblowing dipengaruhi oleh strata organisasi. Terkait pengalaman, mayoritas responden memiliki pengalaman 6-10 tahun (33,3%, atau 15 partisipan), diikuti oleh 1-5 tahun (24,4%, atau 11 partisipan), dan 11-15 tahun (28,9%, atau 13 partisipan). Hanya 13,3% (6 peserta) yang memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun, yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta cukup berpengalaman dan kemungkinan memiliki masa kerja yang cukup untuk membentuk opini yang tepat mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

**4.2 Analisis Keandalan**

Dalam menguji reliabilitas instrumen survei ini, Cronbach's alpha digunakan untuk membangun konsistensi internal skala pada sistem whistleblowing, transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Hasil analisis reliabilitas ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Variable	Cronbach's Alpha
Whistleblowing System	0.85
Government Transparency	0.87
Government Accountability	0.83

Nilai Cronbach's alpha untuk ketiga variabel melebihi ambang batas 0.7, seperti yang dijelaskan oleh George & Mallery (2003), yang mengindikasikan bahwa skala-skala tersebut dapat diandalkan secara internal dan konsisten.

**4.3 Analisis Korelasi**

Koefisien korelasi product moment dari Pearson dihitung untuk menyelidiki hubungan antara sistem pelaporan pelanggaran dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Hasilnya disajikan dalam tabel berikut, Tabel 4.3.

Variable	Whistleblowing System	Government Transparency	Government Accountability
Whistleblowing System	1.00	0.62**	0.58**
Government Transparency	0.62**	1.00	0.73**
Government Accountability	0.58**	0.73**	1.00

Analisis korelasi menunjukkan bahwa sistem whistleblowing berkorelasi positif dengan transparansi pemerintah dengan nilai  $r = 0,62$ ,  $p < 0,01$  dan akuntabilitas pemerintah dengan nilai  $r = 0,58$ ,  $p < 0,01$ . Hal ini berarti bahwa semakin kuat sistem pelaporan pelanggaran, maka semakin tinggi pula tingkat transparansi dan akuntabilitas pada institusi pemerintah.

Selain itu, terungkap pula bahwa terdapat korelasi yang kuat antara transparansi dan akuntabilitas pemerintah:  $r = 0,73$ ,  $p < 0,01$ ; oleh karena itu, kedua variabel tersebut saling terkait karena peningkatan transparansi menghasilkan akuntabilitas yang lebih tinggi.

**4.4 Analisis Regresi**

Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengeksplorasi lebih lanjut dampak sistem whistleblowing terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pertama, model regresi diuji secara terpisah untuk setiap variabel dependen, dengan menggunakan sistem whistleblowing sebagai variabel independen.

**4.4.1 Model 1: Sistem Pelaporan Pelanggaran dan Transparansi Pemerintah**

Tabel 4.4 menunjukkan hasil analisis regresi untuk transparansi pemerintah.

Predictor Variable	B	SE B	Beta	t-value	p-value
Whistleblowing System	0.53	0.12	0.62	4.42	0.000

$R^2 = 0.38$  (Adjusted  $R^2 = 0.36$ ),  $F(1, 43) = 19.53$ ,  $p < 0.001$

Analisis regresi menunjukkan bahwa sistem whistleblowing secara signifikan memprediksi transparansi pemerintah ( $\beta = 0,62$ ,  $p < 0,001$ ). Nilai  $R^2$  sebesar 0,38 menunjukkan bahwa sistem whistleblowing menjelaskan 38% dari varians transparansi pemerintah, yang mengindikasikan hubungan yang moderat namun bermakna.

**4.4.2 Model 2: Sistem Pelaporan Pelanggaran dan Akuntabilitas Pemerintah**

Hasil analisis regresi untuk akuntabilitas pemerintah ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Predictor Variable	B	SE B	Beta	t-value	p-value
Whistleblowing System	0.45	0.13	0.58	3.46	0.001

$R^2 = 0.34$  (Adjusted  $R^2 = 0.32$ ),  $F(1, 43) = 14.31$ ,  $p < 0.001$

Analisis regresi lebih lanjut menunjukkan bahwa sistem whistleblowing secara signifikan memprediksi akuntabilitas pemerintah dengan beta 0,58 dan nilai p kurang dari 0,001. Nilai R-squared sebesar 0,34 menunjukkan bahwa sistem whistleblowing menjelaskan 34% dari varians dalam akuntabilitas pemerintah, sehingga menunjukkan hubungan yang moderat.

**4.5 Pembahasan**

Analisis data yang dilakukan mendukung hipotesis bahwa efektivitas sistem whistleblowing berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah di Indonesia. Analisis korelasi yang dilakukan menunjukkan bahwa ketika sistem whistleblowing kuat, maka akan ada tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi; hal ini menunjukkan

bahwa mekanisme yang efektif untuk melakukan whistleblowing telah tersedia dan dengan demikian dapat membuat karyawan percaya bahwa lembaga tersebut terbuka dan bertanggung jawab atas kegiatannya.

Hal ini juga didukung oleh analisis regresi yang menunjukkan bahwa sistem whistleblowing secara signifikan memprediksi transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah yang dirasakan dapat dicapai jika ada sistem whistleblowing yang terstruktur dengan baik dan mudah diakses.

Hasil ini juga sejalan dengan saran bahwa pemerintah yang transparan akan lebih bertanggung jawab terhadap pegawainya dengan cara bertanggung jawab atas tindakan mereka:  $r = 0,73$ . Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan kunci untuk mendorong budaya akuntabilitas di lembaga-lembaga pemerintah.

#### 4.6 Implikasi untuk Praktik

Temuan penelitian ini memiliki sejumlah implikasi praktis untuk penerapan sistem whistleblowing di lembaga pemerintah di Indonesia. Pertama, lembaga pemerintah harus memastikan bahwa sistem whistleblowing mereka dapat diakses, dipublikasikan dengan baik, dan memberikan perlindungan hukum bagi pelapor. Kedua, lembaga-lembaga tersebut harus memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada karyawan untuk mendorong pelaporan perilaku tidak etis tanpa takut akan pembalasan.

Temuan-temuan ini juga mengungkapkan bahwa peningkatan transparansi pemerintah dapat, sebagian besar, memastikan akuntabilitas. Oleh karena itu, disarankan agar, selain sistem whistleblowing, para pembuat kebijakan menerapkan langkah-langkah lain untuk meningkatkan transparansi lembaga-lembaga pemerintah, seperti pelaporan rutin dan akses informasi oleh publik.

## 5. KESIMPULAN

Studi ini memberikan pelajaran berharga yang dapat dipetik dari peran sistem whistleblowing dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di dalam lembaga pemerintah di Indonesia. Temuan-temuan menunjukkan bahwa mekanisme whistleblowing yang terstruktur dengan baik memiliki dampak positif yang besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan meningkatnya tuntutan akan standar tata kelola yang lebih tinggi dari lembaga pemerintah, membangun dan mempertahankan sistem whistleblowing yang efektif menjadi relevan untuk mendorong perilaku etis dan mencegah korupsi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat erat kaitannya; transparansi merupakan fondasi yang sangat penting untuk meminta pertanggungjawaban lembaga pemerintah. Penelitian di masa depan harus dilakukan dengan jumlah sampel yang lebih besar dan melibatkan berbagai sektor pemerintah untuk meningkatkan generalisasi temuan tersebut. Para pembuat kebijakan didorong untuk mengintegrasikan sistem whistleblowing, di antara inisiatif keterbukaan lainnya, ke dalam tata kelola sektor publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, K., Purwantini, A. H., Afif, N., & Prasetya, W. A. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217.
- Anlilua, P. (2023). Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal KIAFE*, 1(3), 34–48.
- Anugrah, K. A., Prabowo, A. A., & Wardani, D. K. (2021). Pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Whistleblowing System Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Seluruh Kelurahan Di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal). *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 6(2), 13–28.



- Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 321–334.
- Aziza, N. N., Irawan, D., Wicaksono, A. P. N., & Ulum, I. (2024). PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 1694–1709.
- Dela, Y. R., & Frinaldi, A. (2023). Efektivitas Penerapan E–Government di Pemerintah Kabupaten Sijunjung: Studi Kasus Pengaduan Masyarakat Melalui Whistle Blowing System. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 769–779.
- Dewi, N. L. G. K., & Padnyawati, K. D. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Good Government Governance dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 334–344.
- Faradilla, H., & Sofyan, E. (2024). Pengaruh Penerapan E-Procurement, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 2(2), 234–246.
- Handayani, D. N., Herianti, E., & Priharta, A. (2024). Pengaruh Prinsip Good Governance, Proactive Fraud Audit Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)(Studi Empiris Pada Smp Negeri Di Kabupaten Kudus). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 6130–6151.
- Hasanah, A. N., Maria, M., & Oktarida, A. (2023). Pengaruh E-Procurement dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(3), 631–637.
- Jeandry, G., & Mokoginta, R. M. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bos (Studi Empiris pada Sekolah Dasar Kota Ternate). *Jurnal TRUST Riset Akuntansi*, 9(1).
- Lubis, S. S., & Bahmid, B. (2024). Implementasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Di Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(2), 143–147.
- Osman, R. N. A. (2024). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, WHISTLEBLOWING SYSTEM, DAN E-PROCUREMENT TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Empiris pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Jambi). UNIVERSITAS JAMBI.
- Prameswari, K. S., Ayu, P. C., & Pratiwi, N. (2022). Pengaruh Whistleblowing, SPIP, Good Governance, dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 252–269.
- Puspita, D. (2021). Pengaruh Peran Komite Audit, Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Whistleblowing System terhadap Kecurangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 178–183.
- Putri, U. R., Dwiharyadi, A., & Handayani, D. (2024). Analisis Pengaruh Rapat Komite Audit, Audit Internal, dan Whistleblowing System Terhadap Potensi Fraudulent Financial Reporting. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(4), 29–41.
- Rahmarta, V., Pontoh, G. T., & Said, D. (2024). Kekuatan Organisasional Dan Sistem Dalam Pencegahan Fraud: Suatu Tinjauan System Literature Review. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 8(1), 28–43.
- Riyanto, R. F., & Arifin, Z. (2022). Efektivitas Whistleblowing System Dan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Sektor Publik Yang Dimoderasi Oleh Pendeteksian Fraud. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(2), 105–122.
- Rusvalita, E. (2017). PENGARUH PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KPP) DAN KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG DENGAN IMPLEMENTASI WHISTLEBLOWING SYSTEM SEBAGAI VARIABEL. UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Rusvalita, E., Komalasari, A., & Dewi, F. G. (2017). Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Implementasi Whistleblowing System Sebagai Variabel Pemoderasi pada Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(1), 1–25.
- Saida, S., Maslichah, M., & Fakhriyyah, D. D. (2023). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan

- Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa di Kecamatan Pandaan). *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 614–624.
- Siringoringo, W. (2015). Pengaruh penerapan good governance dan whistleblowing system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan resiko sanksi pajak sebagai variabel moderating (Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota Bekasi). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 207–224.
- Sultan, N. F. (2023). *Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Internal Control dan Whistleblowing System Dalam Pencegahan Fraud Dengan Ethical Climate Sebagai Pemoderasi*. Universitas Hasanuddin.
- Ulum, M. C., & Raviona, T. D. (2023). Menuju Birokrasi Berintegritas: Evaluasi Whistleblowing System (Studi pada Inspektorat Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(3), 237–244.
- Utama, M. R., & Hidayatulloh, A. (2020). Peran Risiko Sanksi Pajak Pada Pengaruh Good Governance dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 54–64.
- Wahyuni, E. S., & Nova, T. (2018). Analisis whistleblowing system dan kompetensi aparatur terhadap pencegahan fraud (Studi empiris pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(2), 189–194.
- Wardani, D. K., Prabowo, A. A., & Anugrah, K. A. (2021). Pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Whistleblowing System Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal). *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 6(2), 1–16.
- Wawo, A. (2022). Pengaruh Kualitas Audit dan Whistleblowing System Terhadap Pendeteksian Fraud. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(2), 681–696.
- Wuryandini, A. R., & Panigoro, N. (2024). PENGARUH BYSTANDER EFFECT DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PEMODERASI MORALITAS DAN SISTEM KEUANGAN DESA. *Akuntansi Dewantara*, 8(2), 336–350.
- Yusrizal, Y., Renaldo, N., & Hasri, M. O. (2021). Pengaruh Good Governance dan Whistleblowing System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Risiko Sanksi Pajak sebagai Moderasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 119–134.